

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Agency Theory

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Baturante (2018:119) mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (misal kreditur) selaku prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktifitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban dari agen (manajemen). Berdasarkan laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen.

Namun yang seringkali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu auditor independen.

Menurut Mardiasmo (2004) dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agen. Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan manajemen (pemerintah) dengan kepentingan stakeholder (masyarakat), namun seringkali manajemen melakukan kecurangan untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan.

2. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

a. Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Mulyana (2010:96) mengemukakan bahwa kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Sedangkan, Mahmudi (2016:143) menyebutkan laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Sementara itu, Erlina dan Rasdianto (2013:21) mendefinisikan laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Berdasarkan beberapa definisi atas, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan daerah adalah hasil dari proses pencatatan,

penggolongan, penafsiran dan peringkasan transaksi keuangan daerah yang terdokumentasi sebagai informasi valid dalam rangka pertanggungjawaban guna pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Dimensi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Tanjung (2014:13) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

- 1) Relevan, yang berarti informasi harus memiliki *feedback value*, *predictive value*, tepat waktu dan lengkap
- 2) Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, variabilitas, netralitas
- 3) Dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.
- 4) Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna

c. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Tanjung (2014:14) yang memenuhi karakteristik dari kualitas laporan keuangan yaitu:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
- 3) Tepat waktu
- 4) Lengkap
- 5) Penyajian jujur
- 6) Dapat diverifikasi (*verifiability*)
- 7) Netralitas

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a. Definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Susanto (2009:18) sistem adalah kumpulan/group dari subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang salingberhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satutujuan tertentu.Sedangkan, Suhayati dan Rahayu (2010:221)menerangkanpengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris,manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untukmemberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan berikut ini: (1)Keandalan pelaporan keuangan. (2) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi. (3)Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. (4) Efektivitas dan efisiensi operasi. Hal senada didefinisikan Krismiaji (2010:216)

bahwa pengendalian intern (internal control) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Sementara itu, Mahmudi (2016:251) menjelaskan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terusmenerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal serupa diungkapkan Hasanah dan Fauzi (2016:181) bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses pengendalian berupatindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dan jajarannyadalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalan, pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan peraturanperundang-undangan.

b. Dimensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Mahmudi (2016:253) menguraikannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 bahwa elemen sistem pengendalian pemerintah terdiri atas lima unsur yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan pengendalian intern

c. Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Mahmudi (2016:254) menguraikan karakteristik sistem pengendalian pemerintah sebagai berikut:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Pembentukan struktur organisasi
- 5) Pendelegasian tugas dan wewenang
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM
- 7) Perwujudan peran pengawas internal
- 8) Pengendalian umum
- 9) Pengendalian aplikasi

10) Informasi dan komunikasi

11) Pemantauan (*monitoring*)

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Abdullah (2014:51) kompetensi adalah dimensi perilaku yang ada di belakang kinerja kompeten yang menunjukkan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik. Sedangkan Sutrisno (2012:4) mendefinisikan sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sementara itu, Mangkunegara (2011:40) menyatakan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

★ Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

b. Dimensi Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Wibowo (2007:93) kategori yang terkait kompetensi sumber daya manusia meliputi:

1) *Task achievement*

2) *Relationship*

3) *Personal attribute*

4) *Managerial*

5) *Leadership*

c. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Mangkunegara (2012:40) menguraikan karakteristik kompetensi sumber daya manusia meliputi:

1) Pengetahuan

2) Keterampilan

3) Kemampuan

4) Karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya

5. Sistem Akuntansi Keuangan

a. Definisi Sistem Akuntansi Keuangan

Menurut Mulyana (2010:3) memberikan definisi sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan usaha pengelolaan.

Menurut Tanjung (2009:35) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Sedangkan menurut Rasdianto (2013:6) yang

dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan 'transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis yang dimulai dari prosedur, penyelenggaran, peralatan dan elemen dalam mewujudkan fungsi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

b. Dimensi Sistem Akuntansi Keuangan

Andelina dan Hariyanto (2017:136) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

- 1) Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),
- 2) Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),
- 3) Sistem Akuntansi Sumber Daya Manusia, dan
- 4) Sistem Teknologi Informasi.

c. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan

Menurut Andelina dan Hariyanto (2017:136) Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

mengatakan bahwa indikator sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1) Pencatatan. Siklus pencatatan akuntansi ini meliputi beberapa hal, sebagai berikut :

a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.

b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.

c) Memindah bukukan (*posting*) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

2) Pengikhtisaran. Untuk melakukan pengikhtisaran akuntansi, ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh penyusun laporan keuangan, diantaranya: penyusunan neraca saldo, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja atau neraca lajur, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, pembuatan ayat jurnal pembalik

3) Pelaporan. Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti memasukkan beberapa penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu diharapkan memberikan gambaran atau originalitas temuan.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Variabel yang digunakan	Hasil
1	Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edy Sujana (2015)	<p>Variabel independen: Penerapan sistem akuntansi, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan</p> <p>Variabel dependen: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>secara simultan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
2	Mis Widya Andelina, Agus Hariyanto (2017)	<p>Variabel Independen: Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia.</p> <p>Variabel dependen: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>Penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Demak.</p> <p>Kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Demak.</p>

3	Nurafni Baturante, Jeni Kamase, Fadliah Nasaruddin (2018)	<p>Variabel Independen: Kompetensi SDM, Budaya Birokrasi, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Review Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>Variabel dependen: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . Penerapan SPIP berpengaruh negatif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . Penerapan SAP dan kualitas LKPD berpengaruh positif tidak signifikan . pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . review atas laporan keuangan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD. . budaya birokrasi berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
4	Gita Desipradani, Fitri Nuraini (2018)	<p>Variabel Independen: standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi staf</p>	<ul style="list-style-type: none"> . standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya, . sistem pengendalian intern berpengaruh

		akuntansi Variabel dependen: kualitas laporan keuangan	negatif terhadap kualitas laoran keuangan Pemerintah Kota Surabaya kompetensi staf akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya.
5	Emilda Ihsanti (2014)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel dependen: kualitas laporan keuangan	kompetensi SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan SAKD tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
6	Kartika Dwi Indrayani, Harjanti Widiastuti (2020)	Variabel Independen: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Variabel dependen: kualitas laporan keuangan	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7	Liza Mutiana, Yossi Diantimala, Zuraida (2017)	Variabel Independen: Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia	sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Satker. kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Satker.

		<p>Dan Komitmen Organisasi</p> <p>Variabel dependen: kualitas laporan keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> . teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Satker. . komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Satker
8	Rizki Afri Mulia (2018)	<p>Variabel Independen: kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Variabel dependen: kualitas laporan keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat . Sistem Pengendalian Interberpengaruh positif dan signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
9	Sardio Kartopawiro dan Yohanes Susanto (2018)	<p>Variabel Independen: Kompetensi Sumber daya Manusia, Motivasi, Sistem Akuntansi keuangan daerah</p> <p>Variabel dependen: kualitas laporan keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Kompetensi Sumber daya Manusia terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musirawas berpengaruh positif dan signifikan . Motivasi terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Musirawas berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Musirawas . Sistem Akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Musirawas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan

10	Sella Yunita (2019)	<p>Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>Variabel dependen: kualitas laporan keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat . Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
11	Irzal Tawaqal, Suparno (2017)	<p>Variabel Independen: penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia</p> <p>Variabel dependen: kualitas laporan keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> . penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh. . Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh. . Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh.

C. Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM

yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi.

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Devi (2011), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompotensi, maka Kompetensi Sumber Daya Manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompotensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam kuntansi pemerintahan, keuangan daerah. Artinya, semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016:181) menjelaskan sistem pengendalian intern merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya salah satunya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai terhadap keandalan laporan keuangan. Sementara itu, Mahmudi (2016:251) menyatakan instansi pemerintah harus membangun dan memiliki sistem pengendalian

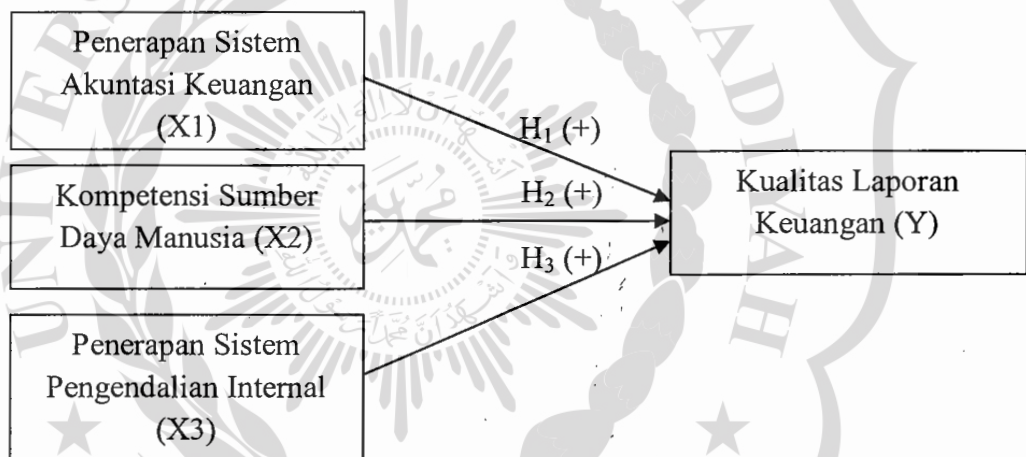
internal yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik salah satu penyebab utamanya berasal dari kuatnya sistem pengendalian internal. Artinya, semakin baik sistem pengendalian internal, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Andeliana dan Hariyanto (2017) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem atau prosedur yang digunakan untuk membantu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak – pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

yang diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari kerangka pemikiran di atas maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti dalam paradigma gambar kerangka pemikiran berikut ini:



Gambar 2.1 kerangka pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pelaporan keuangan memiliki fungsi sebagai pertanggungjawaban, manajerial, hingga

pengawasan. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas dari laporan keuangan, apabila laporan keuangan dipertanggungjawabkan dengan baik yang artinya memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, sesuai dengan pedoman, hingga dalam bentuk dan waktu yang tepat, maka kualitas dari laporan keuangan akan memperoleh karakteristik yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan maka akan sulit memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. (Indrayani dan Widiastuti, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati, dkk (2015) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian oleh Adelina dan Agus Hariyanto (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H₁ : Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Kompetensi sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan kegiatan (Adelina dan Hariyanto, 2017). Manusia adalah salah satu faktor sumber daya yang sangat penting dalam upaya tercapainya tujuan dalam organisasi, sehingga perlu dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Kompetensi sumber daya manusia

mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati,dkk (2015) variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tawaqal dan Suparno (2017) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh.

H₂ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Sistem pengendalian internal

Menurut Desipradani dan Nuraini (2018) sistem pengendalian intern merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang dalam rangka untuk memberikan keyakinan bagi manajemen bahwa suatu organisasi tersebut mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena suatu kegiatan operasional memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu membatasi dan mengkoordinasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Suatu organisasi termasuk pemerintah berkewajiban melakukan pengendalian terhadap kegiatan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka segala kegiatan terutama di bidang keuangan akan berjalan sesuai dengan

prosedur, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Liza Mutiana, Yossi Diántimala, Zuraida (2017) penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Satker. Irzal Tawaqal dan Suparno (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Banda Aceh.

H₃ : Penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

